

Administratur

JURNAL

Vol. 2 No. 1 Agustus 2008

Monang Sitornis, Drs. M. Si.
Pengaruh Pemberdayaan dan Perilaku
Karyawan Terhadap Kualitas Pelayanan
Perijinan SIUP Pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Medan

Dr. Tita Meirina Djuwita, Dra., M. Si.
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Produktivitas Kerja Pegawai

Achdiat
Studi Deskripsi Sistem Administrasi Negara
Malaysia dan Thailand Dalam Perspektif
Perbandingan Administrasi Negara

Hj. Asrofah, Dra., MM.
Jati Diri Entrepreneur Menghadapi Kebuntuan
Usaha

**Studi Deskripsi Sistem Administrasi Negara
Malaysia dan Thailand Dalam Perspektif
Perbandingan Administrasi Negara**

Oleh
Achdiat

*Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Unpas Bandung
dan Mahasiswa Pascasarjana (S3) UNPAD*

Abstrak

Perbandingan Administrasi Negara merupakan salah satu cabang disiplin Ilmu Administrasi Negara dan tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda dibandingkan dengan berbagai disiplin Ilmu Sosial lainnya. Studi ini, dapat ditelaah dengan menggunakan berbagai pendekatan, yang salah satunya adalah pendekatan sistem.

Focus of interest dalam konteks tinjauan Perbandingan Administrasi Negara, antara Administrasi Negara Malaysia dengan Administrasi Negara Thailand, lebih menekankan pada proses interaksi antar kelembagaan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), atau dikenal pula dengan istilah suprastruktur politik yang dibangun melalui dinamika infrastruktur politik, dengan melihat bagaimana aspek struktur dan fungsinya dijalankan secara sistemik, dalam rangka mencapai tujuan negaranya.

Kata kunci: Perbandingan Administrasi Negara dan Pendekatan Sistem

Pendahuluan

MALAYSIA dan Thailand, merupakan negara-negara berkembang yang terletak di kawasan Asia Tenggara, yang telah mampu menunjukkan keberhasilannya dalam memakmurkan negaranya, sehingga kedua negara ini memang patut telah mendapatkan julukan sebagai macan-macannya Asia Tenggara.

Rata-rata Income Per Kapita ASEAN pada Tahun 2001, Negara Malaysia menduduki peringkat ketiga setelah Negara Singapura dan Brunei Darusalam, di mana income per kapitanya sebesar US \$ 3.431 dan pada tahun 2006 meningkat menjadi US \$ 12.100. Income per kapita Negara Thailand sebesar US \$ 1.984, menempati urutan keempat setelah Negara Malaysia. Sedangkan income perkapita Negara Indonesia sekitar US \$ 692 berada pada peringkat keenam setelah Negara Filipina.

Berdasarkan *Human Development Index* ASEAN Tahun 2003, Negara Malaysia berada pada posisi ketiga dengan ranking 61, dan Negara Thailand pada posisi keempat dengan ranking 73 di bawah Negara

Singapura dan Brunei Darusalam. Sedangkan Indonesia berada pada posisi ketujuh dengan ranking 110, setelah Negara Filipina dan Negara Vietnam. Saefullah (2007 : 75).

Melihat realitas tersebut di atas, itulah, yang menjadi dasar pertimbangan, untuk mencermati eksistensi kedua Negara : Malaysia dan Thailand, dalam perspektif perbandingan administrasi negara, melalui pendekatan sistem, dengan menelaah bagaimana proses dalam struktur dan fungsi kelembagaan negara berinteraksi, dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara.

Perbandingan Administrasi Negara Dalam Konteks Pendekatan Sistem

Kantaprawira (1990 : 3), memberikan pandangannya berkaitan dengan pendekatan sistem bahwa "Sistem adalah suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, komponen, Bagian yang banyak ini satu sama lain berada pada keterikatan yang kait mengkait dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga utuh eksistensinya".

Selanjutnya dikatakan pula, pendekatan sistem merupakan pemerian (pendeskripsian) sesuatu sehingga sesuatu itu bertata, berbentuk utuh menyeluruh dan lengkap berikut seluruh faktor yang turut mempengaruhinya. Pendekatan ini, menumbuhkan eksplisitasi dan pandangan yang jelas atas komponen-komponen suatu organisasi secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan organisasi itu, baik meliputi organisasi berpikir atau konsep, maupun sesuatu yang lebih konkrit yang didalamnya terdapat hubungan-hubungan fungsional.

Makkasau (1992 : 5), memberikan pengertian "Sistem merupakan totalitas yang efisien dan efektif, terdiri dari bagian-bagian yang berstruktur dan berinteraksi terartur secara kausalitas dan saling berhubungan satu sama lain di dalam wadah (transformasi / konversi), yang dipengaruhi oleh aspek-aspek lingkungan guna mencapai tujuan".

Sejalan dengan konsep tersebut di atas, Kantaprawira (1992 : 55) meminjam teori *Montesquieu*, mengatakan bahwa "suprastruktur politik merupakan kekuasaan pemerintahan yang dipisah-pisah (menurut *Immanuel Kant : Trias Politica*) terdiri dari Legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tujuannya ialah "separation of power" guna mencegah keabsolutan penguasa. Tetapi kemudian dalam perkembangannya, berubah menjadi pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Kekuasaan atau lembaga yang tiga itulah yang mengambil keputusan secara resmi dan karenanya mengikat umum dengan absah."

Oleh karena itu, *focus of interest* dalam konteks tinjauan Perbandingan Administrasi Negara, antara Administrasi Negara Malaysia dengan Administrasi Negara Thailand, lebih menekankan pada proses interaksi antar lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) atau dikenal pula dengan terminat suprastruktur politik, dengan melihat bagaimana aspek struktur dan fungsinya dijalankan secara sistemik, dalam rangka mencapai tujuan negaranya.

Secara lebih konkrit bagaimana struktur dan fungsi ketiga lembaga negara tersebut dalam menentukan keputusan-keputusannya (proses administrasi negara) dalam rangka mencapai tujuan negara, dikemukakan oleh Riggs dengan mengatakan bahwa sistem administrasi negara adalah "struktur untuk mengalokasikan barang dan jasa dalam suatu pemerintahan".

Aspek Pembahasan

Sukarna (1986 : 23), mengatakan bahwa dalam *approach system*, "Administrasi Negara dilihat sebagai suatu totalitas yang berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi, sehingga apabila terjadi satu bagian macet akan menimbulkan kekuranglancaran pada bagian-bagian lainnya. Pernyataan selanjutnya, sebagai suatu totalitas dan satu kesatuan, sistem administrasi negara dalam arti luas sekali mencakup badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif".

Mengkaji administrasi negara berdasarkan pandangan *system approach* tersebut di atas, Sukarna melanjutkan penjelasannya, bahwa badan eksekutif akan mengalami hambatan apabila badan legislatif dalam rangka merumuskan undang-undang, yang akan menjadi pedoman pelaksanaan badan eksekutif kurang lancar, disebabkan dalam badan perwakilan politik tidak terdapat mayoritas suara untuk menetapkan suatu keputusan.

Di samping itu juga, kerja badan eksekutif kurang dan atau tidak lurus, disebabkan badan yudikatif sebagai badan pengawas yudisil yang berfungsi untuk mengawasi pemerintah, agar supaya pemerintah itu berjalan sesuai dengan undang-undang dan tidak melanggar hak-hak azasi manusia, kurang atau tidak berjalan / berfungsi secara efektif.

Uraian di atas, memperlihatkan bahwa antara ketiga lembaga (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) tersebut di atas saling mempengaruhi, oleh karena itu, administrasi negara sebagai suatu sistem akan dipengaruhi oleh sistem-sistem lainnya, terutama adalah sistem politik dan sistem sosial yang berlaku di negara bersangkutan.

Pengaruh sistem sosial terhadap pelaksanaan sistem administrasi negara, sebagaimana diketahui bahwa sistem sosial merupakan kekuatan yang menjadi pendukung bagi sistem administrasi negara. Oleh karena itu, pada masyarakat yang sistem sosialnya masih paternalistis, feodalistis, otokratis, akan sulit melahirkan suatu sistem administrasi negara yang demokratis. Sehingga dengan demikian, terjadilah perbedaan sistem administrasi negara yang demokratis dan sistem administrasi negara yang diktatoris, di seluruh belahan dunia.

Berdasarkan, pokok-pokok pikiran tersebut di atas, maka untuk memudahkan kajian perbandingan administrasi negara melalui pendekatan sistem, antara Negara Malaysia dan Negara Thailand, penulis merumuskan ke dalam beberapa aspek pembahasan, sebagai berikut :

1. Landasan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan sistem administrasi negara di Malaysia dan Thailand.
2. Bentuk Negara Malaysia dan Negara Thailand.

3. Bentuk Pemerintahan di Negara Malaysia dan Negara Thailand.
4. Sistem Pemerintahan di Negara Malaysia dan Negara Thailand.
5. Sistem Politik : Infrastruktur politik dan Suprastruktur politik di Negara Malaysia dan Negara Thailand.
6. Tugas dan Fungsi Kelembagaan Negara di Negara Malaysia dan Negara Thailand.

Sistem Administrasi Negara Malaysia

a. Profil Negara Malaysia

Negara Malaysia terletak di bagian semenanjung Benua Asia paling selatan dan sebagian terletak di wilayah Kalimantan Utara, yang terdiri dari tiga belas negara bagian diantaranya Johore, Kedah, Klantan, Malacca, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Slangor, Trengganu, Sabah dan Serawak. Masing-masing Negara bagian dikepalai oleh seorang Raja, kecuali daerah Sabah dan Serawak dikepalai oleh Gubernur. Kualalumpur sebagai Ibukota Negara Malaysia, sedangkan Pusat Pemerintahan Federal terletak di Putrajaya.

Sejarah, Semenanjung Malaysia berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara, karena berkembangnya perdagangan antara China dan India, serta negara lainnya melalui Selat Malaka. Kerajaan Melayu, yang paling awal tercatat dalam sejarah, tumbuh dari kota pelabuhan tepi pantai yang dibuat pada abad ke-10. Terdiri dari wilayah Langkasuka dan Lembah Bujang di Kedah, Beruas dan Gangga Negara di Perak, serta Pan Pan di Kelantan. Semuanya, diperkirakan sebagai kerajaan hindu atau Budha. Islam masuk ke kerajaan Melayu sekitar abad ke-14 di Trengganu.

Awal abad ke-15, Kesultanan Malaka yang didirikan oleh dinasti yang dimulai oleh Parameswara dari Palembang, di mana Melaka sebagai ibu kotanya. Kesultanan ini, mengontrol wilayah yang sekarang ini Semenanjung Malaysia, Thailand Selatan (Pattani), dan pantai timur Sumatera. Kerajaan ini, berlangsung selama lebih dari satu abad, dan dalam periode itu menyebarkan agama Islam ke seluruh Kepulauan Melayu. Kesultanan Malaka, menjadi koloni Portugis pada tahun 1511. Britania Raya mengambil alih Malaka pada tahun 1824, dan menjadikannya koloni tahun 1826.

Malaysia merupakan Negara federal yang berbentuk Kerajaan, sebelumnya bernama Federasi Malaya, kemerdekaan dicapai pada 31 Agustus 1957 (Singapura menjadi bagian negara ini). Selanjutnya, berubah menjadi Negara Federasi Kerajaan Malaysia yang dibentuk pada 16 September 1963, dan memegang kekuasaan pokok, yang diantaranya meliputi hubungan luar negeri, ketentaraan, keuangan, dan peradilan.

Pemerintahan Federasi Kerajaan Malaysia memiliki kedaulatan ke luar. Sementara, Negara-negara bagian tetap memiliki kedaulatan ke dalam secara penuh, serta dapat melakukan tindakan pemerintahan, dan membuat konstitusi Negara bagian selama tidak bertentangan dengan konstitusi Negara Federal Malaysia.

Konstitusi Negara Federasi Kerajaan Malaysia, disebut "*The Federal Constitution, Compiled in The Attorney Generals Chambers*". Dengan demikian, jelaslah bahwa bentuk Negara Malaysia merupakan sebuah Negara Federasi, dengan bentuk pemerintahan Monarchi Konstitusional, adapun sistem pemerintahannya menunjukkan sistem pemerintahan parlementer, yang dikepalai oleh seorang Raja yang biasa dikenal dengan nama Yang di-Pertuan Agong. (www.wikipedia.com).

b. Infrastruktur Politik dan Suprastruktur Politik

Fokus kajian dalam perbandingan administrasi Negara dalam konteks makalah ini, penulis merujuk pada temuan para Ahli yang menganalisis berdasarkan aspek infrastruktur politik dan suprastruktur politik, sebagai bagian dari sistem politik yang berlaku di suatu negara tertentu, termasuk proses pemilihan umum yang merupakan mekanisme kepemimpinan nasional, untuk melahirkan kekuasaan pemerintahan negara.

Kekuasaan pemerintahan Negara dalam konteks studi sistem administrasi negara, titik bidiknya meliputi pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit, yang keniscayaannya, merupakan penjabaran dari landasan ideologis dan landasan konstitusional yang dianut suatu negara, Tjokroamidjojo (1994 : 14).

Para pakar di bidang administrasi negara, seperti Bulizuar Buyung (1996 : 28), menyatakan bahwa konteks pemerintahan dalam arti luas meliputi suprastruktur politik, dan pemerintahan dalam arti sempit mengenai penyelenggaraan pemerintahan negara, yang dilaksanakan oleh eksekutif dengan perangkat dibawahnya. Termasuk didalamnya menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi, serta tanggungjawab lembaga-lembaga negara, adalah merupakan ruang lingkup telaah sistem administrasi negara.

Martadisastra (1987 : 80), menguraikan infrastruktur politik Negara Malaysia, terdiri dari partai-partai politik, golongan-golongan, kaum ulama dan ahli agama, tokoh-tokoh nasional, pers, dan media komunikasi. Lembaga-lembaga sosial politik ini, akan terlibat di dalam proses politik dan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen.

Peranan dan kedudukan partai politik di Negara Malaysia sangat besar, karena partai politik sangat berpengaruh dalam kehidupan suprastruktur politik, khususnya dikalangan politik pemerintahan, yang turut mewarnai kebijakan-kebijakan di parlemen. Partai-partai politik banyak memainkan peranan di dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini, terlihat di dalam cara pengangkatan perdana menteri, dan proses penentuan dan pengangkatan jemaah menteri sebagai pemegang kekuasaan yang riil.

Golongan-golongan yang mewakili berbagai jenis warga Negara keturunan asing, organisasi profesional, pengusaha, tani, budayawan, dan berbagai organisasi lainnya, tokoh-tokoh agama atau ulama, serta tokoh-tokoh nasional lainnya, di samping pers dan media massa sebagai media komunikasi, juga sangat berpengaruh di dalam kehidupan politik negeri jiran ini.

Uraian selanjutnya, mengenai suprastruktur politik Negara Malaysia, yang terdiri dari :

1. Majelis Raja-raja.
2. Yang Dipertuan Agong sebagai Kepala Negara, dan Timbalan Yang Dipertuan Agong sebagai wakilnya.
3. Jemaah Menteri (Kabinet), diketuai oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.
4. Parlimen (Parlemen), terdiri dari :
 - a. Yang dipertuan Agong
 - b. Dewan Negara
 - c. Dewan Rakyat
5. Dua Mahkamah Tinggi

c. Tugas dan Fungsi Kelembagaan Negara Malaysia

1. Majelis Raja-raja

Majelis ini beranggotakan 9 raja-raja dari tiap Negara bagian yang berbentuk kerajaan dan 2 gubernur negara bagian Sabah dan Serawak. Majelis Raja-raja bertugas memilih Yang Dipertuan Agong.

Fungsi Majelis, ialah memberi persetujuan atau penilaian mengenai adat istiadat / agama Islam di seluruh negeri persekutuan, tetapi tidak termasuk di negeri persekutuan Sabah dan Serawak.

Tugas dan fungsi lainnya, memberikan persetujuan atau penolakan terhadap suatu masalah yang harus dirundingkan kemudian ditetapkan.

2. Yang Dipertuan Agong

Jabatan ini ditetapkan oleh Majelis Raja/Sultan yang berjumlah 9 orang, untuk menjabat selama 5 tahun secara bergilir. Gubernur sebagai anggota Majelis Raja tidak punya hak untuk memilih dan menentukan Yang Dipertuan Agong.

Yang Dipertuan Agong bertugas menunjuk Perdana Menteri berikut Jemaah Menteri (kabinet).

Yang Dipertuan Agong dapat membubarkan parlemen dan Jemaah Menteri. Meminta untuk diadakan sidang Majelis Raja-raja.

Tugas dan fungsi Yang Dipertuan Agong sebagai Kepala Negara dapat memberikan pengampunan, melakukan penundaan terhadap putusan hukuman mati atas saran dari Mahkamah Tinggi.

Selain itu, Yang Dipertuan Agong bertugas pula selaku ketua agama Islam dalam negerinya. Berkuasa atas hubungan pelembagaan di negerinya, serta dapat melantik seorang pemangku raja atau ahli-ahli Majelis Pangkuan Raja. Yang Dipertuan Agong memegang kekuasaan secara nasional.

3. Jemaah Menteri

Jemaah Menteri diangkat oleh Yang Dipertuan Agong atas nasihat atau saran Perdana Menteri, dan menteri-menteri ini harus anggota Dewan Rakyat dan atau anggota Dewan Negara.

Perdana Menteri menjabat selaku kepala pemerintahan dan juga sebagai Ketua Jemaah Menteri.

Perdana Menteri, ditunjuk oleh Yang Dipertuan Agong, harus ketua partai politik yang mempunyai mayoritas anggota dalam parlemen, dan

juga harus anggota Dewan Rakyat. Jemaah Menteri adalah pemegang kekuasaan yang riil.

4. Parlemen

Parlemen di Malaysia disebut Parlimen, anggota-anggotanya terdiri dari Yang Dipertuan Agong, Dewan Negara, dan Dewan Rakyat.

Anggota Dewan Negara berjumlah 70 orang (senator), dari masing-masing negara bagian diambil dua orang (26 orang), dan 44 orang ditunjuk oleh Yang Dipertuan Agong dari golongan-golongan yang ada.

Anggota dewan Rakyat, berjumlah 222 orang, dan setiap anggota mewakili satu konstituen. Mereka dipilih atas dasar dukungan banyak pihak melalui Pemilu, yang diselenggarakan selama lima tahun sekali, melalui sistem distrik. Setiap anggota Dewan Rakyat memegang jabatan selama lima tahun, dan setelah itu pemilu yang baru akan diadakan kembali. Jadi anggota Parlemen berjumlah sekitar 292 orang.

5. Dua Mahkamah Tinggi

Kekuasaan Yudikatif dibagikan antara pemerintah Negara bagian dan pemerintah persekutuan. Mahkamah Tinggi di Negeri Semenanjung Melayu, dan Mahkamah Tinggi di Negeri Borneo (Sabah dan Serawak).

Masing-masing mahkamah dikepalai oleh hakim utama yang dibantu oleh 12 hakim untuk negeri Melayu, dan 8 hakim untuk wilayah Borneo. (www.wikipedia.com).

Sistem Administrasi Negara Thailand

a. Profil Negara Thailand

Kerajaan Thailand (nama resmi : *Ratcha Anachak Thai*; juga *Pratet Thai*), kadangkala juga disebut *Mueang Taek*, adalah sebuah Negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, sedangkan di barat berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman.

Negara Thailand, dahulu dikenal sebagai *Siam* sampai tanggal 11 Mei 1949. Kata "*Thai*" berarti "Kebebasan" dalam bahasa Thailand, namun juga dapat merujuk kepada suku *Taek*, sehingga menyebabkan nama *Siam* masih digunakan di kalangan orang "*Thai*" terutama kaum minoritas Tionghoa.

Sejarah asal mula Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, Kerajaan *Sukhothai* yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini, kemudian diteruskan menjadi Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan berukuran lebih besar dibandingkan *Sukhothai*.

Kebudayaan Thailand dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16, namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, Thailand tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh Negara Eropa. Pengaruh Barat, yang mengakibatkan berbagai perubahan di Thailand, pada abad ke-19 di mana diberikannya banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania.

Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan dimulainya monarki konstitusional. Sebelumnya dikenal dengan nama

Siam, Negara ini mengganti namanya menjadi Thailand pada tahun 1939 dan untuk seterusnya, setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca-Perang Dunia ke II.

Pada perang tersebut, Thailand bersekutu dengan Jepang; tetapi saat Perang Dunia II berakhir, Thailand menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya perang, namun demikian, Thailand mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an.

Pembahasan mengenai sistem Administrasi Negara Thailand, baik dipandang dari sudut penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas, maupun penyelenggaraan pemerintahan dalam arti sempit, diuraikan berdasarkan rujukan dari hasil pemikiran dan analisis Ukasah Martadisastra (1987 : 87).

Negara Thailand, atau sebutan lainnya seperti Muangthai atau Siam adalah salah satu negara yang berada di wilayah Asia Tenggara, juga merupakan anggota ASEAN. Negara ini, berbatasan dengan Laos dan Birma, yang membentang ke selatan memasuki jajirah Melayu dan berbatasan dengan Kmer (Kampuchea, Kamboja), serta laut Cina Selatan.

Thailand, merupakan negara satu kesatuan yang tidak dapat dipecah-pecah, seperti dinyatakan dan dijelaskan di dalam Konstitusinya yaitu *"Interim Constitution of The Kingdom Of Thailand"*, pasal 2 yang menyebutkan : *"Thailand is a Kingdom, one and indivisible"*. Dengan demikian, Negara Thailand merupakan Negara satu kesatuan yang mempunyai sifat sentralistik.

Sentralisasi kekuasaan di Negara Thailand, ditunjukkan oleh semua urusan kenegaraan dan pemerintahan ditangani oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintahan lokal hanyalah bersifat administratif dan patuh serta menjalankan semua peraturan dan kebijakan yang telah digariskan / ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kepala Negara Thailand tidak dipilih oleh suatu badan atau diatur dengan peraturan-peraturan tertentu, melainkan berdasarkan kedudukan yang berlangsung secara turun-temurun. Dengan demikian, Kepala Negara Thailand ialah seorang Raja, sebagai simbol dari bangsa dan Negara Thailand, dan sama sekali bukan sebagai pemegang kekuasaan riil. Oleh karena itu, bentuk pemerintahan Negara Thailand adalah monarki konstitusional.

Pemegang kekuasaan pemerintahan riil adalah Dewan Menteri yang ditunjuk dan diangkat oleh Raja, atas anjuran dan nasihat Perdana menteri. Sedangkan, Perdana Menteri diangkat oleh Raja berdasarkan mayoritas suatu partai politik yang menguasai parlemen. Jadi dengan demikian, sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Thailand, dikenal dengan sistem pemerintahan parlementer.

b. Infrastruktur Politik dan Suprastruktur Politik

Kekuatan infrastruktur politik di Thailand memegang peranan yang cukup strategis dan sangat menonjol, di mana jumlah partai politik di Negara Thailand pada tahun 1987 saja terdapat 58 partai politik. Peran strategis partai politik tercermin di dalam menentukan pemegang

kekuasaan riil pemerintahan negara, melalui pembentukan Dewan menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri, yang dihasilkan lewat proses pemilu. (Martadisastra. 1987 : 89).

Bila di dalam proses pemilihan umum tidak tercapai suatu angka mayoritas, dibentuklah kabinet atau Dewan Menteri koalisi. Pada keadaan seperti ini, biasanya tidak mustahil terjadinya krisis atau perselisihan baik dalam kabinet itu sendiri, maupun perselisihan yang terjadi dengan Majelis Nasional.

Pada kondisi seperti tersebut di atas, memungkinkan tampilnya kekuatan militer sebagai Dewan revolusioner yang akan menggulingkan pemerintahan dan mengambil alih pemerintahan, dengan dalih menyelamatkan krisis pemerintahan dalam Negara. Oleh karena itu, di Thailand, bentuk pemerintahan monarki konstitusional dapat disebut pula sebagai bentuk pemerintahan *monarki "revolusioner"*.

Tetapi, hal ini, hanya terjadi sewaktu-waktu, yaitu ketika terjadinya suatu krisis antara dewan menteri dengan parlemen, atau manakala terjadinya suatu krisis pemerintahan, bila kabinet tidak dipercayai oleh mayoritas di dalam parlemen. Tampilnya, kekuatan militer sebagai dewan Revolusioner akan mengambil alih pemerintahan dari pemerintahan sipil ke pemerintahan militer.

Jadi dengan demikian, di Negara Thailand, selain daripada kekuatan partai politik, maka kekuatan militerpun mempunyai peranan atau pengaruh, dalam kehidupan infrastruktur politik. Selain kekuatan partai politik, dan kekuatan militer, terdapat pula kekuatan pers dan media massa yang juga berpengaruh di dalam proses politik Thailand.

Thailand, sebuah Negara yang paling sering mengalami pergantian baik pemerintahan maupun konstitusinya. Konstitusi yang terakhir disahkan ialah *"Interim Constitution of The Kingdom of Thailand"*, yang berlaku sejak tanggal 28 Januari 1959 hingga kini. Konstitusi ini menetapkan organ-organ kenegaraan / suprastruktur politik.

Suprastruktur politik Negara Thailand sesuai konstitusinya, terbagi ke dalam beberapa lembaga-lembaga negara, yang terdiri dari :

1. Raja Thailand, sebagai Kepala Negara.
2. Dewan Menteri / Kabinet, yang dipimpin oleh Perdana Menteri.
3. Parlemen, yang disebut sebagai Majelis Nasional (*National Assembly*), yang merupakan satu-satunya lembaga perwakilan rakyat dan yang sekaligus merupakan tempat wakil-wakil rakyat membela kepentingan-kepentingan rakyat yang diwakilinya.

c. Tugas dan Fungsi Kelembagaan Negara Thailand

Konstitusi Negara Thailand, lebih lanjut menyatakan bahwa *"The person of the King is sacred and inviolable"*. Dengan demikian, Raja hanyalah merupakan lambang dari Bangsa dan Negara Thailand, yang sama sekali tidak mempunyai kekuasaan riil. Sedangkan, yang memegang kekuasaan riil adalah Dewan Menteri.

Dewan Menteri ditunjuk dan diangkat oleh Raja atas anjuran dan nasehat Perdana Menteri. Adapun, jabatan Perdana Menteri sebagai penanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan negara diangkat

oleh Raja, berdasarkan mayoritas suatu partai politik yang menguasai sebagian besar kursi di parlemen.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sistem politik yang berlaku di Negara Thailand, khususnya yang bersifat suprastruktur politik, dapat dilihat dari hubungan timbal balik di antara organ-organ / lembaga-lembaga kenegaraan. Interaksi di antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya, dapat dijelaskan sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya. Untuk itu, mengenai kelembagaan negara di Thailand, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Raja Thailand

Kedudukannya sebagai lambang Negara dan Bangsa Thailand, diangkat secara turun-temurun; Kekuasaannya mengangkat Perdana Menteri berikut menteri-menteri negara atau Dewan Menteri / Kabinet.

2. Dewan Menteri

Dewan Menteri ini terdiri dari Perdana Menteri dan para menteri negara. Perdana Menteri merupakan sebagai ketua Dewan Menteri. Kekuasaan yang dimilikinya nyata (riil), yaitu menjalankan pemerintahan negara selama memperoleh kepercayaan dari Majelis Nasional.

Dewan Menteri inipun sekaligus merupakan "*a committee of the National Assembly*". Kewenangan lainnya, Perdana Menteri dapat menghukum siapa saja yang dianggap membahayakan rakyat atau pertumbuhan demokrasi di Thailand tanpa melalui proses pengadilan.

3. Majelis nasional (*National Assembly*)

Majelis ini merupakan satu-satunya badan perwakilan atau parlemen yang dipilih melalui pemilihan umum. Selain daripada itu, majelis ini dapat mengajukan mosi tidak percaya kepada Dewan Menteri; Bila ini terjadi, maka Perdana Menteri harus dengan segera menyerahkan mandat kepada Raja, dan selanjutnya Dewan Menteri dinyatakan demisioner.

Bila Dewan Menteri ketika menerima mosi beranggapan bahwa Majelis Nasional sudah tidak mencerminkan segenap aspirasi rakyat Thailand, maka Dewan Menteri melalui Perdana Menteri dapat mengajukan usul / saran kepada Raja untuk membubarkan Majelis Nasional, dan dengan segera menyelenggarakan pemilihan umum.

Pemilihan Umum di Negara Thailand, sebagai mekanisme pemilihan kepemimpinan pemerintahan (eksekutif) dilakukan selama empat tahu sekali, melalui sistem pemilihan distrik. (www.wikipedia.com).

Kesimpulan

Gambaran umum mengenai Perbandingan Sistem Administrasi Negara Malaysia dengan Sistem Administrasi Negara Thailand dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 1: Perbandingan Sistem Administrasi Negara
Malaysia dan Thailand**

No	Ciri-Ciri	Negara Malaysia	Negara Thailand
1	Konstitusi	<i>The Federal Constitution, Compiled in The Attorney Generals Chambers</i>	<i>Interim Constitution of The Kingdom of Thailand</i>
2	Bentuk Negara	Federasi	Satu Kesatuan
3	Bentuk Pemerintahan	Monarchi Konstitusional	Monarchi Konstitusional / Monarchi Revolusioner
4	Sistem Pemerintahan	Parleментар	Parleментар
5	Sistem Politik : •Suprastruktur politik	<ul style="list-style-type: none"> • Majelis Raja • Yang Dipertuan Agong / Timbalan Yang Dipertuan Agong • Jemaah Menteri / Kabinet • Parlimen/Parlemen: <ul style="list-style-type: none"> - Yang Dipertuan Agong - Dewan Negara - Dewan Rakyat • Dua Mahkamah Tinggi : <ul style="list-style-type: none"> - Negara Bagian - Persekutuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Raja Thailand • Dewan Menteri • Majelis nasional
6	•Infrastruktur Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Partai-Partai Politik • Golongan-Golongan • Kaum Ulama • Tokoh-Tokoh Nasional • Pers • Media Komunikasi Politik 	<ul style="list-style-type: none"> • Partai-Partai Politik • Kekuatan Militer /Kelompok Dewan Revolusioner • Pers • Media Komunikasi Politik
	Pemilihan Umum	• 5 tahun sekali	• 4 tahun sekali

Jemaah Menteri / Kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, merupakan penyelenggara pemerintahan riil di Negara Malaysia. Perdana Menteri ditunjuk / diangkat oleh Yang Dipertuan Agong Diraja Malaysia, berasal dan harus dari ketua partai politik yang mempunyai mayoritas anggota dalam parlimen (parlemen).

Jemaah Menteri diangkat oleh Yang Dipertuan Agong atas nasihat atau saran dari Perdana Menteri. Menteri-menteri ini diangkat harus berasal dari anggota Dewan Rakyat dan atau berasal dari anggota Dewan Negara. Susunan Kabinet / Jemaah Menteri di Negara Malaysia terdiri dari 27 Kementerian Departemen dan Non Departemen.

Penyelenggara pemerintahan riil di Negara Thailand, disebut Dewan Menteri (Kabinet). Dewan Menteri ini terdiri dari Perdana Menteri dan para Menteri Negara. Perdana Menteri merupakan ketua Dewan Menteri yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kekuasaan pemerintahan selama memperoleh kepercayaan dari Majelis Nasional.

Perdana Menteri di Negara Thailand diangkat oleh Raja berdasarkan hasil mayoritas anggota suatu partai politik yang menguasai sebagian besar kursi di parlemen, yang dilaksanakan melalui proses pemilihan umum, yang diselenggarakan selama empat tahun sekali.

Dewan Menteri ditunjuk dan diangkat oleh Raja atas anjuran dan nasehat Perdana Menteri. Susunan Kabinet / Dewan Menteri Negara Thailand berdasarkan hasil pemilihan umum Desember 2007, terdiri dari 41 Kementerian Negara.

Kendatipun Negara Malaysia dengan Negara Thailand, memiliki kesamaan-kesamaan terutama dalam bentuk pemerintahannya yaitu monarkhi konstitusional, dan sistem pemerintahannya yang bersifat parlementer. Namun demikian juga, kedua negara ini, memiliki perbedaan-perbedaan dalam hal bentuk negara, di mana Negara Malaysia berbentuk federasi, sedangkan bentuk Negara Thailand merupakan satu kesatuan.

Di samping itu, sistem politik kedua negara ini pun berbeda, terutama menyangkut suprastruktur politiknya, sedangkan infrastruktur politik di Thailand terdapat kekuatan militer. Perbedaan ini, dipengaruhi oleh sejarah, sistem sosial dan budaya yang berkembang di negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Buyung, Bulizuar. 1996. *Materi Pokok Sistem Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta : Karunika dan Universitas Terbuka (UT).
- Djamily, Mizwar, dkk. 1985. *Mengenal PBB dan 170 Negara di Dunia*. Jakarta : PT. Kreasi Jaya Utama
- Kantaprawira, Rusadi. 1992. *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*. Bandung : Sinar Baru.
- _____, 1990. *Aplikasi Pendekatan Sistem dalam Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Bunda Karya.
- Makkasau, M.A. 1992. *Metoda Analisa Sistem Pola Operasional Administrasi*. Jakarta : Karunika.
- Martadisastra, Ukasah. 1987. *Perbandingan Administrasi Negara*. Bandung : Penerbit NOVA.
- Riggs, Fred W. (ed). 1989. *Administrasi Pembangunan : Sistem Administrasi dan Birokrasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Saefullah, H. A. Djadja. 2008. *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik : Perspektif Manajemen sumber Daya Manusia dalam Era Desentralisasi*. Bandung : LP3AN FISIP UNPAD.

- Sukarna. 1986. *Administrasi Negara Perbandingan*. Bandung : Penerbit Alumni.
- _____, 1986. *Administrasi Negara Perbandingan Jilid II*. Bandung : Penerbit Alumni.
- _____, 1990. *Administrasi Negara perbandingan jilid III*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2004. *Sistem Administrasi negara Indonesia Jilid I* (LAN. RI.). Jakarta : Gunung Agung.
- _____. 2004. *Sistem Administrasi negara Indonesia Jilid II* (LAN. RI.). Jakarta : Gunung Agung.
- www.wikipedia.com. 2008. Negara Malaysia dan Negara Thailand.

DAFTAR PUSTAKA

- Boyung, Buisman. 1996. *Manajemen Sistem Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta : Kencana dan Universitas Terbuka (UT).
- Opandy, Mizar, dkk. 1985. *Manajemen POU dan 170 Negara di Dunia*. Jakarta : PT. Graha Jaya Utama.
- Kanagaputra, Rosadi. 1993. *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Perbandingan*. Bandung : Sinar Baru.
- _____. 1990. *Apresiasi Perbandingan Sistem dalam Rangka Sosial*. Jakarta : Bunda Karya.
- _____. 1992. *Metode Analisis Sistem Pola Operasional*. Administrasi. Jakarta : Kencana.
- _____. 1987. *Perbandingan Administrasi Negara*. Bandung : Penerbit NOVA.
- _____. 1980. *Administrasi Pemerintahan : Sistem Administrasi dan Birokrasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Seidman, F. A. Djalal. 2008. *Perbandingan Kontemporer Administrasi Publik*. Yogyakarta : Mumpuni Sains Press.
- _____. 2008. *Perbandingan Administrasi Negara*. Bandung : LPPAN FISIP UNPAD.